

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan perairan laut yang luas dimana wilayahnya terdiri atas belasan ribu pulau yang tersebar sehingga disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah menerapkan beberapa sistem pemerintahan dalam keberlangsungan pemerintahan negaranya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada masa Orde Baru Indonesia menerapkan kebijakan sistem pemerintahan memusat yang disebut sistem sentralisasi, dimana sistem penyelenggaraan pemerintah serta kewenangannya diatur oleh pemerintah pusat. Namun dengan kondisi wilayah dan sistem pemerintahan yang dianutnya ini, pemerintah pusat menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan transparansi secara proporsional terhadap pembangunan nasional. Karena hal ini menumbuhkan tendensi bagi pemerintah pusat untuk lebih memfokuskan dirinya pada pembangunan di pusat dan seolah mengenyampingkan kebutuhan pembangunan yang ada di daerah, khususnya daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat.

Imbasnya terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang cukup signifikan antar daerah. Sehingga hal ini berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan adanya ketimpangan pembangunan dan pelayanan yang tidak tertata secara transparan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk merubah kebijakan yang ada, yakni merubah kebijakan sentralisasi menjadi

sistem desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ini terbentuk seiring dengan lahirnya

Kebijakan Otonomi Daerah yang lahir dari Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dengan disyahkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbaharui lagi pada tahun 2014 menjadi UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi UU No. 33 Tahun 2004 (Sjafrizal, 2015:105).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi ini adalah meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan reponsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2009:2). Menurut Halim (2001) dalam Dey Aji Suseno (2013) menjelaskan bahwa:

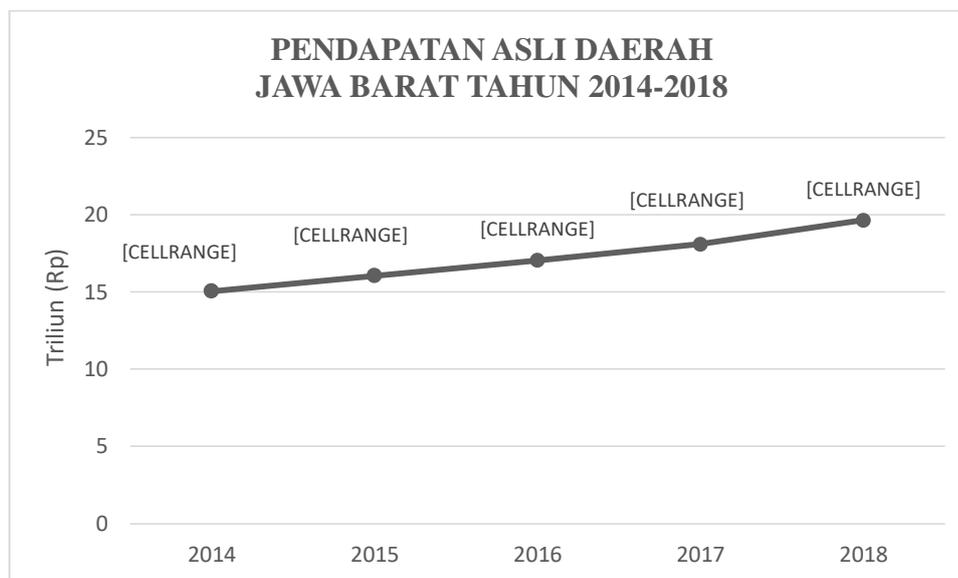
“ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi besar.”

Pelaksanaan otonomi daerah pada provinsi dan yang selanjutnya dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan untuk menentukan sumber daya keuangan potensial daerah serta alokasi sumber daya yang dimiliki tersebut untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Dalam rangka membiayai roda pemerintahan daerah serta meningkatkan kemampuan keuangan daerah, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya disamping mendapat bantuan alokasi dana dari pusat untuk mewujudkan kemandirian daerah. Selain untuk tujuan tersebut, peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik yang disebut *good governance* (Toar, 2016:560). Menurut Natya Mutiarahajarani (2018:2316), sumber pembiayaan daerah yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah dimana indikator utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan hal ini, selanjutnya pemerintah pusat menetapkan kebijakan perpajakan dan retribusi daerah ini dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga setelah secara resmi Undang-undang tersebut diberlakukan pada 1 Januari 2010, memberi kewenangan penuh kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengelola pajak dan retribusi yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam Undang-undang tersebut juga, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Seperti halnya menurut Suparmoko (2002:55) yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian diikuti dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari sumber Pendapatan Asli Daerah ini adalah sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah itu sendiri.

Provinsi Jawa Barat merupakan suatu daerah otonom yang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang cukup tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan bertahannya peringkat Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat yang menduduki peringkat kedua terbesar se-Indonesia setelah DKI Jakarta selama tahun anggaran 2014-2018.



Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Gambar 1.1
Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa selama lima tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa selama periode tersebut Jawa Barat sudah mampu melaksanakan desentralisasi fiskalnya serta cukup mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini juga dibuktikan dengan dinobatkannya Provinsi Jawa Barat sebagai pemerintah terbaik 2018 dalam rangka Hari Otonomi Daerah 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Banyuwangi (PikiranRakyat.com, 2019).

Namun dibalik meningkatnya kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat, ternyata terdapat fenomena yang terjadi pada beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat. *Pertama*, dibalik meningkatnya pendapatan pajak daerah Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, namun

penerimaan tersebut ternyata tidak memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Dapat diuraikan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Bandung tahun 2016 hanya menacapai 78,2% saja, tahun 2017 mengalami peningkatan dengan capaian 90,62%, namun pada tahun 2018 hanya mencapai 81,7%. Menurut Ema Sumarna selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya target beberapa jenis pajak yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya realisasi pajak reklame yang hanya mencapai 0,05% yang disebabkan adanya kendala perizinan (detikNews, 2018). *Kedua*, penerimaan retribusi daerah pada kabupaten/kota di Jawa Barat rata-rata mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun beberapa daerah ini mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya seperti yang terjadi pada Kota Cirebon dan Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disebabkan karena sifat retribusi yang tidak dapat dipaksakan seperti halnya pajak.

Dikutip dari artikel Antara dalam m.ayotasik.com pada Rabu 11 Desember 2019 yang berjudul “Kabupaten Tasikmalaya terima bantuan keuangan Rp744 Miliar, terbesar se-Jabar” menyatakan bahwa asumsi potensi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya yang besar berbanding terbalik dengan realita yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa keputusan ini dibuat karena Kabupaten Tasikmalaya merupakan kawasan lindung tertinggi (65%), indeks pembangunan manusia terendah kedua di Jawa Barat, rumah tangga miskin tertinggi di Jawa Barat, serta merupakan daerah dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah di Jawa Barat. Hal ini menandakan bahwa kemandirian

keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya masih rendah karena terfokus pada penerimaan dana transfer pusat maupun provinsi serta belum melakukan optimalisasi potensi penerimaan pendapatan daerahnya.

Fenomena selanjutnya terjadi pada daerah dengan penduduk paling banyak di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, dimana Kabupaten Bogor ini merupakan peraih Pendapatan Asli Daerah terbesar di Jawa Barat pada tahun 2018 namun juga dibarengi dengan banyaknya desa tertinggal didalamnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Bogor, Ade Yasin bahwa 45 desa dari 419 desa di Kabupaten Bogor masih berstatus desa tertinggal (detikNews, 2019). Hal ini disebabkan belum optimalnya alokasi dana untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor juga merupakan pertanda belum optimalnya pemerintah daerah dalam mengenali dan mengembangkan potensi daerahnya.

Dilihat dari fenomena-fenomena diatas dimana masih terdapat penurunan atau tidak stabilnya Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, setiap daerah diharapkan bisa lebih menggali potensi penerimaan pajak dan retribusi daerahnya agar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai dan meningkat yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kemandirian daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan uraian diatas, penelitian yang akan digunakan oleh peneliti merujuk kepada penelitian sebelumnya antara lain:

1. Asma Mufidah, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet (2017) Universitas Islam dengan judul Malang Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi

Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang). Berdasarkan hasil penelitian Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Ardiyan Natoen, Evada Dewata, Yuliana Sari, Susi Ardiani, dan Karina Leonasari (2018) Politeknik Negeri Surabaya dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan, variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Habibatul Mukarramah (2017) UIN Syarif Hidayatullah dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Serta pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4. R. Budi Hendaris (2014) Universitas Jenderal Achmad Yani dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Barat, dengan besar pengaruhnya sebesar 51,51%. Seacara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat, Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat.

5. Adi Nugroho (2014) Universitas Dian Nuswantoro dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial dan simultan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian juga didapatkan nilai koefisien determinasi *adjust R square* sebesar 0,478 yang berarti 47,8% variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah, selebihnya 52,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.
6. Puja Rizqy Ramdhan (2019) Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah 33 Kabupaten/Kota di Sumatera

Utara secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

7. Beta Asteria (2015) STIE Widya Wiwaha dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Dan secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.
8. Krisna Arta Kusuma dan Putu Wirawata (2013) Universitas Udayana dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel penerimaan pajak daerah dan variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
9. Yudi Hartono (2017) UNP Yogyakarta dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 2012-2016). Berdasarkan hasil penelitian, pajak daerah dan retribusi daerah secara simutan

dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Toar Waraney Lakoy, Daisy S.M Engka, Steeva Y.L Tumangkeng (2016) Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). Berdasarkan hasil penelitian, rata rata retribusi daerah dari tahun 2005 sampai dengan 2014 memiliki kontribusi yang sedang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan pertumbuhan retribusi daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya. Dari hasil regresi diperoleh adanya hubungan positif antara retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minahasa Selatan. Dari hasil regresi sederhana yang ada ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
11. Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) Universitas Islam Lamongan dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, pajak Daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.
12. Dwi Handayani dan Elva Nuraina (2012) UNP Madiun dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja

Daerah Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil penelitian, Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.

13. Dwika Julia Mutiara (2015) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap PDRB Di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di 8 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2004-2013.
14. Regina Usman (2017) Universitas Telkom dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,6%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
15. Rizka Lutfita Novalistia (2016) Universitas Pandanaran Semarang dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014). Berdasarkan hasil penelitian, baik Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah, sedangkan variabel retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian daerah. Dan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

16. Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, dan Eulin Karlina (2018) AMIK BSI Bekasi dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor. Dan secara simultan, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor.
17. Frangky Martinus Mea, Vicky V.J Panelewen, dan Arie D.P Mirah (2017) Universitas Sam Ratulangi dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50% dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 % atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Lalu Pajak hotel diklasifikasikan pajak potensial, pajak restoran diklasifikasikan potensial, pajak hiburan terbelakang, pajak

reklame diklasifikasikan berkembang, pajak penerangan jalan (PPJ) diklasifikasikan prima, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) diklasifikasikan potensial, pajak air tanah terbelakang, pajak sarang burung walet diklasifikasikan terbelakang, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) diklasifikasikan potensial dan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) diklasifikasikan potensial.

18. Putri Puspita Ayu (2018) UNP Kediri dengan judul Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa Pemerintah Daerah sudah mulai mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat.
19. Jumingan dan Kasidin (2017) STIE Atma Bhakti Surakarta dengan judul *The Analisis of The Acquisition of Taxes, Levies, and Other Local Revenues's Effect Toward Originals Original Local Government Revenue Improvement In The City of Surakarta*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Surakarta. Hasil perhitungan statistik menjelaskan bahwa pendapatan pajak daerah merupakan pendapatan yang lebih dominan memberikan kontribusi terhadap kenaikan

PAD sebesar 88,7%, sedangkan variabel retribusi daerah hanya berkontribusi sebesar 14,2% dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 2,6% terhadap PAD Surakarta.

20. Didik Hadiyatno, Susiswo, Siti Patimah, Hermin Nainggolan, dan Rihfenti Ernayani (2020) STIE Balikpapan dengan judul *The Effect of Local Taxes, Regional Retribution, and Other Legal District Own Source Revenues on the Increase of District Own Source Revenue*. Berdasarkan hasil penelitian pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah baik untuk Kota Balikpapan, Samarinda, maupun Bontang.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Asma Mufidah, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet (2017) Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Retribusi Parkir • Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 	Pajak parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	e-Journal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, Vol. 6, No. 2 2017
2	Ardiyanto, Evada Dewata, Yuliana Sari, Susi Ardiani, dan Karina Leonasari (2018) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk variabel retribusi daerah	Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, Vol. 2 No. 1 2018 ISSN: 2622-7940

	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan			tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	
				<ul style="list-style-type: none"> • Variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 	
3	Habibatul Mukarramah (2017) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Subjek penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 	Variabel dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. • Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 	Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
4	R. Budi Hendaris (2014) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah • Subjek penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 		<ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Barat, dengan besar pengaruhnya sebesar 51,51%. • Secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan 	Jurnal Akuntansi Universitas Jenderal Achmad Yani

					Kotamadya di Jawa Barat. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat.	
5	Adi Nugroho (2014)	Nugroho Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik secara parsial maupun simultan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah • Dari hasil penelitian diatas didapatkan nilai koefisien determinasi <i>adjust R square</i> sebesar 0,478. Hal ini berarti 47,8 % variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah, selebihnya 52,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model. 	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro ISSN: 2460-4291
6	Puja Ramdhan (2019)	Rizqy Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 		Berdasarkan hasil penelitian pajak daerah dan retribusi daerah 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi Vol. 1 No. 5 Mei 2019 ISSN 2503-0337
7	Beta Asteria (2015)	Asteria Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap 	Jurnal Riset manajemen STIE Widya Wiwaha Vol. 2

	Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 		<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah. 	No. 1 Januari 2015, 51-61
8	Krisna Arta Kusuma dan Putu Wirawata (2013) Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. • Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 5 No. 3 Hal 574-585 ISSN: 2302-8556
9	Yudi Hartono (2017) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 2012-2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jurnal Program Studi Akuntansi UNP Yogyakarta

10	Toar Waraney Lakoy, Daisy S.M Engka, Steeva Y.L Tumangkeng (2016) Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.	<ul style="list-style-type: none"> • Rata rata retribusi daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 memiliki kontribusi yang sedang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan pertumbuhan retribusi daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya. • Dari hasil regresi diperoleh adanya hubungan positif antara retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minahasa Selatan. Dari hasil regresi sederhana yang ada ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 16 NO. 1 2016
11	Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017	Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: Kemandirian Keuangan Daerah • Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 	Secara parsial dan simultan, pajak Daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Universitas Islam Lamongan Vol. V No. 2 Desember 2019 Hal 162-175 ISSN: 2597-9116
12	Dwi Handayani dan Elva Nuraina (2012) Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi	Variabel independen: Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Dana Alokasi Khusus • Variabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja 	Jurnal Akuntansi dan Pendidikan UNP Madiun Vol. 1 No. 1

	Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun		dependen: Alokasi Belanja Daerah	daerah. • Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. • Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.	Oktober 2012 ISSN: 2477-4995
13	Dwika Julia Mutiara (2015) Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap PDRB Di Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah • Menggunakan analisis regresi data panel 	Variabel dependen: PDRB	Pajak daerah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di 8 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2004-2013.	Jurnal Ilmu Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4 No. 1 April 2015 ISSN: 2087-2046
14	Regina Usman (2017) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,6%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	JAF – <i>Journal of Accounting and Finance</i> Universitas Telkom Vol. 1 No. 1 September 2017 ISSN: 2581-1088
15	Rizka Lutfitia Novalistia (2016) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Menggunakan metode sensus 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak • Variabel dependen: 	• Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian	Journal of Accounting Universitas Pandanaran Semarang Vol. 2 No. 2 (2016) ISSN: 2502-7697

	Kemandirian Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)		Tingkat Kemandirian Daerah	Daerah, sedangkan variabel retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian daerah.	
			<ul style="list-style-type: none"> Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 	<ul style="list-style-type: none"> pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 	
16	Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, dan Eulin Karlina (2018) Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen: Retribusi Daerah. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 	<ul style="list-style-type: none"> Secara parsial, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor. Secara simultan, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab. Bogor. 	Jurnal MONETER AMIK BSI Bekasi Vol. 5 N0. 2 Oktober 2018 ISSN: 2550-0139
17	Frangky Martinus Mea, Vicky V.J Panelewen, dan Arie D.P Mirah (2017) Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen: Pajak Daerah. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis kontribusi dan pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50% dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 % atas Pendapatan Dana 	Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat Vol. 13 No. 2A, Juli 2017 Hal: 323-334 ISSN: 1907-4298

Minahasa	Transfer Pemerintah Pusat ke daerah.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak hotel diklasifikasikan pajak potensial, pajak restoran diklasifikasikan potensial, pajak hiburan terbelakang, pajak reklame diklasifikasikan berkembang, pajak penerangan jalan (PPJ) diklasifikasikan prima, pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB) diklasifikasikan potensial, pajak air tanah terbelakang, pajak sarang burung walet diklasifikasikan terbelakang, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) diklasifikasikan potensial dan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) diklasifikasikan potensial.
18 Putri Puspita Ayu (2018) Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel: Pendapatan Asli Daerah • Variabel independen: Dana Perimbangan • Variabel dependen: Kinerja Keuangan • Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. <p data-bbox="1023 1507 1262 1991">Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah</p> <p data-bbox="1289 1507 1482 1749">Jurnal Akuntansi dan Ekonomi UNP Kediri Vol. 3 No. 1, Maret 2018 Hal: 80-96 ISSN: 2541-0180</p>

				Daerah, artinya bahwa Pemerintah Daerah sudah mulai mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat.	
19	Jumingan dan Kasidin (2017) <i>The Analisis of The Acquisition of Taxes, Levies, and Other Local Revenues's Effect Toward Originals Original Local Government Revenue Improvement In The City of Surakarta.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Surakarta. • Hasil perhitungan statistik menjelaskan bahwa pendapatan pajak daerah merupakan pendapatan yang lebih dominan memberikan kontribusi terhadap kenaikan PAD sebesar 88,7%, sedangkan variabel retribusi daerah hanya berkontribusi sebesar 14,2% dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 2,6% terhadap PAD Surakarta. 	<i>International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)</i> Volume 8, Issue 11, November 2017, pp. 437–445 ISSN: 0976-6316
20	Didik Hadiyatno, Susiswo, Siti Patimah, Hermin Nainggolan, dan Rihfenti Ernayani (2020) <i>The Effect of Local Taxes, Regional Retribution, and Other Legal District Own Source Revenues on the Increase of District Own Source Revenue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah 		Berdasarkan hasil penelitian pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah baik untuk Kota Balikpapan, Samarinda, maupun Bontang.	<i>e-Journal of Humanities and Social Sciences</i> Vol. 8 No. 1 2020, pp 426-431 eISSN: 2395-6581

Dewi Sisca Suryani (2020) : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018)

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan.

Masalah-masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dimaksud, maka dapat diuraikan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Sedangkan dalam aplikasinya diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai topik yang sesuai dengan judul di atas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dan menjadi bahan pertimbangan serta pengembangan kinerja lembaga agar tujuan dan target lembaga dapat tercapai dengan baik.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat melalui pengambilan data yang diperoleh dari situs resmi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh dan mengolah data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis telah melaksanakan penelitian selama tujuh bulan yaitu dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 dan jadwal penelitian terlampir dalam lampiran 1 halaman 105.